**Strategi Adaptasi Masyarakat Kota Makassar Terhadap Bencana Banjir : Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural**

**Ibrahim Arifin1\*, Jamaluddin Arifin2, Zulkifli Arifin3**

1Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

Email: [ibrahim@unm.ac.id](mailto:ibrahim@unm.ac.id)

2Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [jamaluddinarifin@unismuh.ac.id](mailto:jamaluddinarifin@unismuh.ac.id)

3Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: [iccunkarifin@gmail.com](mailto:iccunkarifin@gmail.com)

***Abstrak:*** *Banjir merupakan peristiwa yang mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kota Makassar. Dalam menangani persoalan banjir tersebut, Kota Makassar menerapkan berbagai strategi adaptasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengantisipasi bencana banjir dikemudian hari, atau bertahan sesaat dan sesudah banjir terjadi. Penelitian ini membahas strategi adaptasi masyarakat Kota Makassar terhadap bencana banjir dengan menggunakan tinjauan teori fungsionalisme struktural. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tanpa partisipan, media sosial, dan data sekunder seperti berita dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi masyarakat terbagi menjadi tiga aspek utama: fisik, sosial, dan ekonomi. Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan sejumlah strategi adaptasi, terdapat keterbatasan dalam upaya adaptasi kolektif. Masyarakat lebih cenderung menggunakan strategi adaptasi reaktif daripada proaktif, yang menunjukkan kekurangan dalam integrasi sosial dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Disfungsi dalam fungsi sosial masyarakat dan kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan diinterpretasikan melalui lensa fungsionalisme struktural.*

***Kata Kunci:*** *Strategi Adaptasi, Banjir, Fungsionalisme Struktural*

**PENDAHULUAN**

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah yang cenderung datar, dengan ketinggian rata-rata hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Makassar terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, Indonesia. Sebagai salah satu kota terbesar, kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² dan penduduk sebesar 1 436 626 jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023). Secara geografis, kota Makassar berada di pesisir pantai Teluk Bone, yang membentang di sepanjang Laut Makassar. Letak geografis kota Makassar yang berada di pesisir pantai, membuatnya rentan terhadap bencana alam seperti banjir (Rachmat, 2014).

Persoalan banjir di kota Makassar terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 1999-2020 terjadi banjir besar pada tahun 2013 yang menyebabkan 5.763 korban terdampak. Selain itu, banjir besar kembali terjadi tahun 2019 yang mengakibatkan 8.328 warga terdampak serta telah merusak fasilitas publik yang ada di Kota Makassar (Darlin, 2021). Realitas banjir yang terjadi di Makassar semakin mudah terjadi saat ini. Hujan yang terjadi 1-2 jam dengan intensitas yang tinggi bisa menyebabkan genangan pada beberapa titik di Makassar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar (2023), sepanjang tahun 2023, tercatat 102 kejadian banjir di berbagai wilayah kota. Sejumlah titik banjir yang cukup parah di kota Makassar terjadi di jalan urip sumoharjo depan gubernuran, di jalan Pettarani, depan Universitas Islam Makassar, depan persimpangan Perumahan BTP Tamalanrea (Anriani et al., 2019). Titik tersebut merupakan wilayah yang selalu terdampak banjir selama lima tahun terakhir.

Menurut Rachmat dan Pamungkas (2014) salah satu penyebab terjadinya banjir di Makassar adalah kondisi drainase yang tidak memadai. Kondisi ini kemudian diperparah dengan kurangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang semakin berkurang di Makassar (Bahri, 2018). Selain itu, curah hujan yang berkisaran 546 hingga 640,2 milimeter yang mana tergolong pada curah hujan yang tinggi menjadikan kota Makassar semakin rentan banjir dalam priode Desember hingga Februari (Rachmat, 2014). Akibatnya, banjir menjadi peristiwa tahunan yang tak terhindarkan di beberapa bagian Kota Makassar.

Posisi geografis Kota Makassar yang berada pada ketinggian 0-6 meter di atas permukaan laut, yang termasuk dalam kategori dataran rendah, memiliki kontribusi signifikan terhadap kecenderungan genangan air saat terjadi pasang laut. Selain itu, kemiringan lereng yang landai juga berdampak pada cepatnya naiknya air pasang, yang secara langsung menggenangi sebagian wilayah Kota Makassar. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Makassar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anriani dkk (2019), Posisi geografis Kota Makassar yang berada pada ketinggian 0-6 meter di atas permukaan laut, yang termasuk dalam kategori dataran rendah, memiliki kontribusi signifikan terhadap kecenderungan genangan air saat terjadi pasang laut. Selain itu, kemiringan lereng yang landai juga berdampak pada cepatnya naiknya air pasang, yang secara langsung menggenangi sebagian wilayah Kota Makassar. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Makassar.

Permasalahan yang timbul dari peristiwa banjir yang terjadi di Makassar merupakan gabungan antara masalah fisik dan sosial. Secara fisik, banjir menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kota seperti jalan, bangunan, dan sistem drainase, yang mempengaruhi mobilitas dan akses masyarakat serta berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Di sisi lain, secara sosial, banjir juga membawa dampak psikologis dan sosial yang serius bagi masyarakat, termasuk ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian terkait keamanan tempat tinggal dan mata pencaharian masyarakat kota Makassar.

Menurut Diakakis yang dikutip dalam Anirwan dan Haris (2023) banjir yang terjadi pasti akan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat kerusakan fasilitas publik, seperti jalan raya, rumah, sekolah, dan sarana kesehatan. Selain itu, banjir juga berdampak negatif terhadap sektor pertanian dan perikanan, mengganggu pasokan pangan dan sumber daya alam lokal (Anirwan & Haris, 2023).

Dalam menghadapi ancaman banjir ini, masyarakat dan pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai cara sebagai langkah pencegahan. Namun, hingga saat ini problematika banjir yang ada di Kota Makassar belum juga teratasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa bencana alam merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang mengakibatkan kerugian. Sehingga semua lapisan masyarakat harus bertindak untuk menyelamatkan.

Dalam menangani ancaman bencana banjir ini, masyarakat Kota Makassar harus mengembangkan berbagai strategi adaptasi terhadap kondisi yang dinamis ini. Menurut Gultom dkk (2020) adaptasi merupakan langkah penyesuaian sistem alam dan sosial untuk mengatasi efek buruk dari perubahan iklim. Dengan demikian, dalam konteks kebencanaan, adaptasi diartikan sebagai upaya penyesuaian masyarakat terhadap bencana yang bisa terjadi kapan saja baik terjadi saat ini ataupun di masa yang akan datang. Penyesuaian yang dilakukan masyarakat terjadi dalam aspek fisik dan sosial. Masyarakat Kota Makassar memiliki berbagai cara untuk beradaptasi terhadap bencana banjir. Adaptasi ini dapat berupa tindakan pencegahan, seperti membuat tanggul atau memasang pompa air, maupun tindakan penanggulangan, seperti evakuasi atau mencari tempat berlindung.

Banjir di Kota Makassar, yang terus berulang setiap tahunnya, telah menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat kota. Masyarakat beradaptasi dengan bencana ini dengan berbagai cara, yang mencerminkan bagaimana mereka menyesuaikan struktur dan fungsi sosial mereka untuk menjaga keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu.

Artikel ini meneliti berbagai strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Makassar dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian ini menggunakan tinjauan teori fungsionalisme struktural untuk memahami bagaimana masyarakat Kota Makassar beradaptasi dengan bencana banjir dengan cara menyesuaikan struktur dan fungsi sosial yang ada di masyarakat.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang strategi adaptasi masyarakat Kota Makassar terhadap bencana banjir. Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti ingin menggambarkan berbagai situasi, kondisi, dan variabel yang terkait dengan fenomena adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir. Penelitian ini berfokus pada permasalahan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat Kota Makassar akibat bencana banjir.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penjabaran eksploratif. Metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan makna subjektif masyarakat dalam menghadapi bencana banjir (Denzin & Lincoln, 2018). Metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menjelajahi bagaimana bencana banjir memengaruhi struktur sosial, norma, nilai, dan tradisi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi tanpa partisipan dengan mengamati berbagai adaptasi yang dilakukan masyarakat kota Makassar terkait bencana banjir baik dari media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook atau dari lingkungan sekitar. Data sekunder, seperti berita dan laporan resmi, juga dimanfaatkan untuk melengkapi dan memperkaya analisis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Banjir adalah peristiwa perluapan air yang menggenangi daratan yang biasanya kering. Menurut Astuti & Sudarsono (2018) banjir adalah situasi di mana saluran pembuangan air, seperti sungai atau kali, tidak mampu menampung atau mengalirkan air dengan lancar. Banjir memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian materiil yang disebabkan oleh banjir, seperti kerusakan properti dan infrastruktur. Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari banjir, termasuk kehilangan nyawa, ketidaknyamanan, dan ketergantungan pada bantuan luar, juga menjadi subjek penelitian yang penting.

Dalam konteks banjir, struktur sosial masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat merespons dan mengatasi dampak sosial yang dihadapi. Misalnya, lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga, komunitas lokal, dan lembaga pemerintah, dapat menjadi penopang utama dalam memberikan bantuan dan dukungan sosial kepada individu dan kelompok yang terkena dampak. Di sisi lain, hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat, seperti jaringan kekerabatan dan komunitas, juga dapat menjadi sumber dukungan yang signifikan selama periode pasca-banjir.

Di kota Makassar, permasalahan banjir masih menjadi permasalahan yang terjadi setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa terdapat 1 kelurahan yang tergolong sangat rentan, 10 kelurahan lainnya juga masuk dalam kategori sangat rentan, dan 51 kelurahan cukup rentan terhadap banjir yang ada di kota Makassar (Bahri, 2018). Banjir di Makassar sering terjadi di wilayah yang dilintasi sungai Tallo dan Pampang, seperti di kecamatan Biringkanaya (Katimbang), Tamalanrea, Panakukang, dan Manggala (Bahri, 2018). Dalam rentang waktu 1999-2020, Kota Makassar mengalami dua peristiwa banjir besar yang signifikan. Pada tahun 2013, banjir besar terjadi dan menyebabkan dampak bagi 5.763 individu. Kemudian, pada tahun 2019, banjir besar yang melanda Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, kembali terjadi dan memengaruhi 8.328 orang (Darlin, 2021). Berdasarkan analisis tingkat rentan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar memiliki tantangan yang signifikan dalam menghadapi bencana banjir.

Berdasarkan data diatas kota Makassar memerlukan strategi adaptasi dalam menghadapi bencana banjir. Masyarakat memiliki berbagai strategi untuk menghadapi banjir, yang terbagi menjadi tiga aspek utama: fisik, sosial, dan ekonomi. Pada aspek fisik, masyarakat melakukan upaya seperti meninggikan fondasi rumah, membersihkan saluran drainase, dan memindahkan barang berharga. Di sisi sosial, masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang banjir, mengikuti pelatihan tanggap bencana, dan aktif dalam organisasi komunitas. Dampak ekonomi banjir diatasi dengan mencari alternatif pekerjaan, memanfaatkan bantuan sosial, dan meningkatkan ketahanan keuangan.

Adaptasi terkait bencana banjir membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam mengembangkan strategi yang tepat. Namun, strategi adaptasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga dilakukan dari pihak pemerintah. Berikut adalah strategi adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar dalam menghadapi bencana banjir:

1. Pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur dan sistem drainase yang lebih baik, seperti meninggikan tanggul, membangun bendungan, dan memperlebar saluran air (Anirwan & Haris, 2023).
2. Upaya mitigasi banjir di Kota Makassar meliputi penerapan regulasi tata ruang yang ketat. Aturan ini melarang pembangunan penting di wilayah yang rawan banjir (Anriani et al., 2019).
3. Membuat kebijakan dan program adaptasi banjir Pemerintah Kota Makassar (Bahri, 2018)
4. Upaya penanggulangan banjir di Kota Makassar juga mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mengelola sumber daya air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
5. Pemerintah kota Makassar telah mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk membantu masyarakat dalam menghadapi banjir berupa peta digital pantauan citra satelit di BMKG Kota Makassar.
6. Pemerintah Kota Makassar juga fokus pada edukasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang banjir. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko banjir, penyebabnya, dan tindakan yang harus diambil saat terjadi banjir.

Dalam konteks penanggulangan banjir, kebijakan yang relevan adalah RTRW, Tata Ruang, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun, terdapat ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan dalam mencocokkan objek program yang sama terkait penanggulangan banjir (Anriani et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antar dinas, komunikasi yang lemah antar pemangku kepentingan, dan keterbatasan sumber daya.

Teori Fungsionalisme Struktural, yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, menekankan pada interkoneksi antar elemen dalam suatu sistem sosial dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini menekankan pada interkoneksi antar elemen dalam suatu sistem sosial dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tinjauan teori fungsionalisme struktural, ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan dalam penanggulangan banjir dapat dijelaskan sebagai akibat dari disfungsi struktural dalam sistem sosial Kota Makassar. Menurut teori fungsionalisme struktural, setiap bagian dari struktur sosial memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem secara keseluruhan (Wirawan, 2014).

Ketidaksinkronan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar dinas dan lemahnya komunikasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, struktur organisasi pemerintah Kota Makassar mungkin tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan efektif, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakselarasan dalam penanganan banjir. Pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM, tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penanggulangan banjir. Hal ini menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak efektif dalam mengatasi masalah banjir. Ketidakselarasan antar pemangku kebijakan mungkin mencerminkan kurangnya keselarasan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi faktor yang memperparah ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan. Tanpa dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur, dinas terkait mungkin mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam kerangka fungsionalisme struktural, setiap bagian dari struktur sosial dianggap memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Ketika terjadi disfungsi dalam penanggulangan banjir, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial yang relevan. Setiap bagian dari masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, dinas terkait, dan masyarakat umum, saling berinteraksi dalam menangani masalah banjir. Kebijakan tak merespon kebutuhan masyarakat, dan masyarakat tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan jurang komunikasi yang menghambat efektivitas sistem.

Strategi adaptasi terhadap bencana banjir tidak hanya dilakukan satu arah oleh pemerintah. Tapi juga dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya menanggulangi berbagai dampak dari bencana banjir yang terjadi. Adapun strategi adaptasi masyarakat kota Makassar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meninggikan struktur rumah, baik pondasi maupun lantai, atau membangun rumah bertingkat (minimal 2 lantai) (Yuliadi, 2017).
2. Membuat penahan air didepan rumah dan tempat yang tinggi untuk menyimpang barang (Bahri, 2018). Hal ini dilakukan untuk menyimpan barang berharga agar tidak hanyut terbawa oleh banjir.
3. Menyadari potensi genangan air, masyarakat beradaptasi dengan membangun sumur bor dan melengkapinya dengan penutup yang lebih tinggi dari permukaan tanah.
4. Berdasarkan hasil penelitian oleh Bahri (2018) dibeberapa daerah yang rawan banjir di Kota Makassar terdapat perahu di rumahyang dijadikan transportasi saat terjadi banjir. Selain itu pemenuhan kebutuhan air bersih yang awalnya dari sumur bor, diubah menjadi mengandalkan air hujan ketika sumur bor telah tertutup oleh banjir. Pemenuhan kebutuhan lain dilakukan dengan menyediakan persediaan bahan makanan karena akses jalanan yang hanya bisa dilalui oleh perahu.
5. Normalisasi kanal dan evakuasi warga yang terdampak banjir di kota Makassar (Rachmat, 2014).

Berbagai strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat yang diungkapkan dalam beberapa penelitian diatas, menunjukkan bahwa strategi adaptasi yang ada masih hanya dalam lingkup lingkungan keluarga atau bisa dikatakan masih dalam aspek perorangan. Dalam kehidupan bermasyarakat atau secara umum tampaknya belum ada strategi adaptasi yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat kota Makassar. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bahri (2018) Masyarakat minim melakukan upaya adaptasi kolektif terhadap banjir. Mereka hanya membangun perahu atau rakit untuk menyelamatkan kendaraan saat banjir, yang tergolong sebagai adaptasi reaktif. Oleh karena itu, bantuan atau fasilitasi dari pemerintah untuk mendukung adaptasi kolektif menjadi tidak efektif.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Rachmat & Pamungkas, 2014) Masyarakat minim melakukan upaya adaptasi kolektif terhadap banjir. Mereka hanya membangun perahu atau rakit untuk menyelamatkan kendaraan saat banjir, yang tergolong sebagai adaptasi reaktif. Oleh karena itu, bantuan atau fasilitasi dari pemerintah untuk mendukung adaptasi kolektif menjadi tidak efektif.

Dalam teori struktural fungsional, masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks adaptasi terhadap banjir di Makassar, masyarakat seharusnya berfungsi untuk melindungi anggota-anggotanya dan menjaga keberlangsungan aktivitas sosial serta ekonomi di tengah bencana. Dalam konteks adaptasi terhadap banjir di Makassar, fungsi sosial yang terpenuhi adalah upaya individu dan keluarga untuk melindungi diri dan harta benda mereka. Namun, fungsi sosial yang tidak terpenuhi adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama secara kolektif untuk menghadapi dan mengurangi dampak banjir secara efektif. Idealnya, masyarakat seharusnya dapat menyediakan dukungan sosial dan sumber daya kolektif untuk membantu anggotanya yang terkena dampak banjir, tetapi hal ini tidak terwujud.

Dalam teori struktural fungsional, disfungsi adalah ketidakmampuan sistem sosial untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam konteks adaptasi terhadap banjir di Makassar, disfungsi terjadi karena kurangnya upaya kolektif dalam menghadapi bencana. Masyarakat hanya mengandalkan strategi adaptasi reaktif seperti membangun perahu atau rakit untuk menyelamatkan kendaraan saat banjir, tanpa adanya upaya untuk merencanakan strategi adaptasi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam teori struktural fungsional, pemerintah dianggap sebagai salah satu institusi utama yang bertanggung jawab atas koordinasi dan fasilitasi fungsi sosial dalam masyarakat. Namun, jika pemerintah gagal memberikan dukungan dan fasilitasi yang memadai dalam upaya adaptasi kolektif terhadap banjir, hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk merespons dengan efektif terhadap bencana tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa kurangnya integrasi sosial masyarakat kota Makassar dalam menghadapi banjir dapat mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk merespons bencana secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan upaya-upaya untuk memperkuat keterlibatan dan koordinasi antara individu, kelompok, dan pemerintah dalam menghadapi bencana alam.

**KESIMPULAN**

Banjir adalah peristiwa perluapan air yang menggenangi daratan yang biasanya kering. Dalam konteks banjir, struktur sosial masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana masyarakat merespons dan mengatasi dampak sosial yang dihadapi. Di kota Makassar, permasalahan banjir masih menjadi permasalahan yang terjadi setiap tahunnya. Dalam rentang waktu 1999-2020, Kota Makassar mengalami dua peristiwa banjir besar yang signifikan. Berdasarkan data diatas kota Makassar memerlukan strategi adaptasi dalam menghadapi bencana banjir.

Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengimplementasikan sejumlah strategi adaptasi, terdapat keterbatasan dalam upaya adaptasi kolektif terhadap bencana banjir. Beberapa strategi yang telah diterapkan lebih bersifat proaktif, seperti alokasi dana untuk infrastruktur drainase dan pembangunan sistem peringatan dini, namun masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal koordinasi dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya adaptasi masyarakat Kota Makassar terhadap bencana banjir masih terbatas pada tingkat individu atau keluarga. Strategi adaptasi yang ada cenderung bersifat reaktif dan tidak melibatkan koordinasi yang cukup di tingkat masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan ini menggarisbawahi pentingnya mengembangkan strategi adaptasi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir. Kurangnya integrasi sosial antara anggota masyarakat Kota Makassar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi secara kolektif terhadap banjir. Kekurangan dalam kerjasama dan koordinasi di antara individu dan kelompok dalam menghadapi bencana tersebut menegaskan urgensi untuk meningkatkan integrasi sosial sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.

Dalam konteks peran pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap adaptasi kolektif masyarakat terhadap banjir masih belum optimal. Diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dalam memberikan bantuan dan fasilitasi yang memadai bagi masyarakat Kota Makassar dalam menghadapi bencana banjir. Ini mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya adaptasi kolektif, alokasi sumber daya yang merata, dan peningkatan peran serta pemerintah dalam mendukung upaya adaptasi masyarakat. Ketidakselarasan dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan serta keterbatasan sumber daya dapat diinterpretasikan sebagai disfungsi dalam fungsi sosial yang relevan dalam sistem sosial Kota Makassar. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem secara keseluruhan dalam menghadapi bencana banjir.

**Daftar Pustaka**

Anirwan, A., & Haris, A. (2023). Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mewujudkan Ketahanan Kota Pascabencana Banjir. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, *5*(2), 187–195.

Anriani, H. B., Arifin, A., Halim, H., Zainuddin, R., & Iskandar, A. M. (2019). Bencana Banjir dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kota Makassar. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, *2*(1), 1–7.

Astuti, A. F., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci. *Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci*, *7*(3), 163–170.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. (2023). *Data Kejadian Bencana Banjir di Kota Makassar Tahun 2023*. https://bnpb.go.id/berita/bpbd-kota-makassar

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2021-2023*. Sulsel.Bps.Go.Id. https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk.html

Bahri, S. (2018). *Kajian Adaptasi Terhadap Banjir Di Kota Makassar*.

Darlin, E. D. (2021). *Strategi Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim Kota Makassar*.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.

Gultom, B. J. B., Jati, D. R., & Andi, A. (2020). Komparasi Adaptasi Bencana Banjir Di Kawasan Waterfront Sungai Kapuas (Pontianak) Dan Sungai Kakap. *Jurnal Pengembangan Kota*, *8*(1), 12–22.

Rachmat, A. R. (2014). *Arahan adaptasi kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar*.

Rachmat, A. R., & Pamungkas, A. (2014). Faktor-Faktor Kerentanan yang Berpengaruh Terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Teknik Pomits*, *3*(2), 1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

Wirawan. (2014). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Pradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Kencana.

Yuliadi, D. (2017). Model Adaptasi Banjir Rob Kawasan Pesisir Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Penjaringan Pantai Utara Jakarta). *Doctoral Dissertation, IPB (Bogor Agricultural University*.